

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa dan merupakan tonggak dalam pembangunan tersebut, oleh karena penguasaan ilmu dalam pembangunan tersebut dan penerapan ilmu dalam segala aspeknya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Untuk mendapatkan dan menguasai ilmu pengetahuan sangat diperlukan komunikasi yang terarah, terencana, sistematis, terus-menerus dan menyeluruh melalui pendidikan.

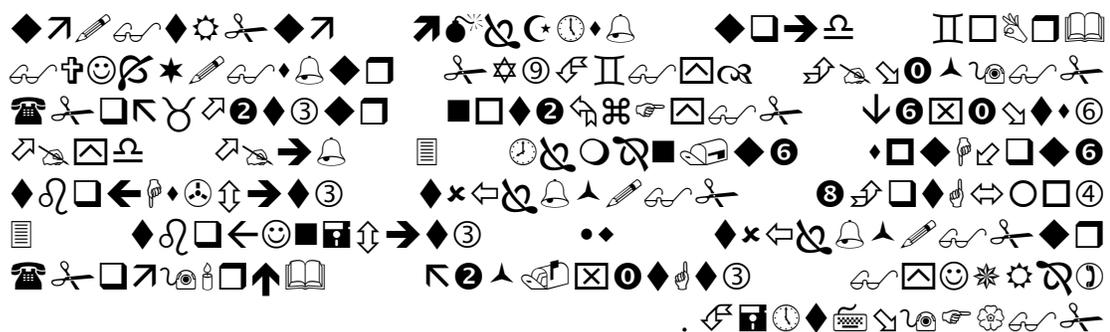
Pendidikan merupakan masalah fundamental dalam pembangunan suatu bangsa dan bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang positif bagi siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan, menghasilkan manusia yang mampu berdiri sendiri, pertumbuhan dan perkembangan tersebut dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, memiliki nilai spiritual yang mantap serta memiliki kemampuan dan skill untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pendidikan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, jelas bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan menitikberatkan pada bidang pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Terhadap masalah pendidikan, Islam pun sangat besar perhatiannya dan dengan tegas mengemukakan pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-qur'an surah Zumar ayat 9:



Untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ajaran Islam, pemerintah berupaya dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan jalur sekolah sebagai sarana untuk memberikan pengajaran kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Lembaga pendidikan jalur sekolah ini yang langsung ditangani oleh pemerintah atau negeri dan ada pula yang ditangani

¹ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjasarannya*, (Jakarta: Cemerlang, 2003) h. 12.

serta didirikan oleh masyarakat atau swasta. Disamping itu, lembaga pendidikan ini ada yang beridentitas umum dan ada pula yang beridentitas keagamaan.

Sekolah atau lembaga pendidikan, sebagaimana telah diketahui bertujuan untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga untuk mengisi formasi-formasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemerintah. “Hal ini berarti bahwa tamatan suatu sekolah atau lembaga pendidikan tertentu diharapkan adalah manusia Indonesia yang memiliki kualifikasi ahli baik secara akademis maupun profesional”.²

Pendidikan sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan juga merupakan faktor mendasar dalam pembangunan bangsa, karena dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang menjadi modal dasar pembangunan dapat lebih ditingkatkan, bahkan tidak jarang aspek pendidikan menjadi ukuran terhadap maju mundurnya suatu bangsa.

Suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terarah jika setiap tahun lembaga pendidikan tersebut menentukan dan membuat terlebih dahulu rencana atau kebijakan yang akan dijalankan, juga informasi yang menunjukkan bagaimana rencana dan kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. “Rencana dan kebijakan lembaga pendidikan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembaharuan pendidikan”.³

Agar tujuan pendidikan nasional yang sudah digariskan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan pendidikan yang menyangkut pada permasalahan pengaturan, penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan di dalam

² Helen A, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) h. 50.

³ Tajab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Karya Aditama, 1994) h. 5.

pelaksanaan pendidikan. Pengelolaan di dalam pendidikan keseluruhan itulah yang disebut dengan administrasi pendidikan.

Dalam sekolah terdapat berbagai kegiatan administrasi pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhanuddin, bahwa yang menjadi bidang-bidang administrasi pendidikan sekolah adalah :

1. Administrasi pengajaran
2. Administrasi kesiswaan
3. Administrasi personalia
4. Administrasi keuangan
5. Administrasi peralatan pengajaran
6. Administrasi perlengkapan sekolah
7. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat⁴

Agar pengelola pendidikan sukses dalam mengelola tugasnya, maka mereka harus menguasai bidang-bidang garapannya dan dapat mengaplikasikannya.

Peranan administrasi sangat membantu dalam setiap usaha yang dilaksanakan bersama sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dengan pengelolaan administrasi secara formal yang baik dan dengan terjadinya kerja sama sungguh-sungguh dari semua personal yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan yang diinginkan.

Proses administrasi bermula dari adanya kerjasama yang saling berkesinambungan mulai dari ruang lingkup yang kecil hingga ke ruang lingkup yang

⁴Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995) h. 57.

lebih luas. Dengan adanya kerjasama tersebut maka proses pendidikan diharapkan dapat berjalan secara baik.

Berdasarkan observasi sementara penulis di MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas, nampaknya kegiatan administrasi sekolah berjalan lancar, namun ada satu bidang kegiatan administrasi yang belum terlaksana dengan baik, yaitu bidang administrasi kesiswaan. Dalam teori administrasi pendidikan sekolah khususnya bidang administrasi kesiswaan ada berbagai kegiatan yang harus dikelola secara baik agar proses belajar mengajar di sekolah dan berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan di sekolah. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya mulai dari penerimaan siswa baru sampai mereka lulus. Tapi dalam prakteknya, administrasi kesiswaan di MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas nampaknya belum terlaksana dengan baik.

Dalam penerimaan siswa baru perlu direncanakan terlebih dahulu tentang penyusunan panitia beserta program kerjanya, pendaftaran calon siswa baru (pengumuman, tempat, waktu, syarat dan sebagainya), penyeleksian berdasarkan NEM dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang tersedia di kelas I, pengumuman calon yang diterima, dan registrasi. Hal ini kalau tidak direncanakan dengan matang akan menimbulkan permasalahan misalnya jumlah kelas 3 dan dalam satu kelasnya memuat maksimal 40 orang tetapi murid yang diterima masuk mencapai 130 orang, hal ini mengakibatkan suasana kelas tidak nyaman karena siswanya terlalu banyak dan ribut yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam administrasi kesiswaan pencatatan siswa baru ke dalam buku induk dan buku klapper terkadang pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan apabila dibutuhkan saja baru dikerjakan padahal seharusnya apabila nilai yang diberikan oleh masing-masing wali kelas sudah ada itu langsung dimasukkan ke dalam buku induk siswa.

Berdasarkan observasi awal dan informasi yang penulis dapatkan pada MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan pada sekolah tersebut. Untuk itu penulis mengadakan sebuah penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN ADMINISTRASI KESISWAAN DI MADARASAH ALIYAH NEGERI SELAT TENGAH KABUPATEN KAPUAS”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap judul di atas maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut :

1. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti melaksanakan sesuatu.⁵

Yang dimaksud adalah bagaimana cara melaksanakan pengadministrasian siswa di MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas.

2. Administrasi kesiswaan menurut Hedyat Soetopo dan Westy Soemanto, adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktifitas yang

⁵ Poermadarmita, W. J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998) h. 334.

berkaitan dengan siswa, yaitu mulai masuknya siswa sampai keluarnya siswa dari sekolah atau lembaga.⁶ Yang dimaksud di sini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan untuk pembinaan peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.

Jadi pelaksanaan administrasi kesiswaan adalah suatu cara melaksanakan suatu penataan atau pengaturan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan untuk pembinaan peserta didik, dimulai dari masuknya siswa sampai keluarnya siswa dari sekolah.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut maka fokus masalah pada penelitian ini adalah pelaksanaan administrasi kesiswaan di Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah Kabupaten Kapuas yang kegiatannya meliputi:

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya lembaga pendidikan dalam mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan saat ini adalah dengan meningkatkan pelayanan madrasah terhadap siswa khususnya di bidang administrasi kesiswaan.

⁶ Hendayat Soetopo dan Westy Soetomo, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h.89.

Di dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan diperlukan sebuah kepemimpinan kepala madrasah yang terampil karena kepala madrasah memegang peranan yang sangat penting, segala keputusan akhir dari setiap kegiatan madrasah ada pada kewenangan kepala madrasah. Tugas kepala madrasah dengan dibantu oleh wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dalam hal penerimaan siswa baru, pembinaan siswa di madrasah, pemantapan program kesiswaan akan menentukan kelancaran semua pelaksanaan program yang dirancang sebelumnya.

Pelaksanaan administrasi kesiswaan berkaitan dengan pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan ini melibatkan para staf, guru dan pegawai bahkan dari pihak luar, maka kepala madrasah perlu menjalin koordinasi, kerja sama dan komunikasi melalui adanya:

- 1) Rapat secara periodik yang dapat dilaksanakan setiap akhir program semester sehingga diketahui hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperlukan.
- 2) Rapat evaluasi program pembinaan kesiswaan, yang dilaksanakan setiap akhir tahun program pengajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembinaan siswa.

E. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah :

1. Mengingat administrasi kesiswaan merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

2. Mengingat administrasi merupakan garapan yang pertama dan utama dilaksanakan dalam administrasi pendidikan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan di Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah Kabupaten Kapuas.
2. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kesiswaan di Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah Kabupaten Kapuas.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi para penyelenggara pendidikan khususnya para Wakamad Kesiswaan terutama menyangkut tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan.
2. Secara praktisnya penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab.

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, Focus masalah, kerangka pemikiran, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan teoritis tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan, yang terdiri dari pengertian administrasi kesiswaan, tujuan administrasi kesiswaan, fungsi-fungsi administrasi kesiswaan dan jenis-jenis kegiatan administrasi kesiswaan.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.